

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia yang memiliki banyak pulau dan budaya, Indonesia adalah negara yang memiliki masyarakat beragam dan multi suku. Negara Indonesia juga merupakan salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Semua warga negara Indonesia yang sudah berhak memilih selalu terlibat dalam pesta demokrasi. Demikian pula Indonesia telah memberikan semua warga negara atas hak demokrasi yang luas sehingga mereka memiliki hak untuk mengangkat pemimpin, hak yang diberikan oleh negara kepada warga untuk memilih dalam pemilihan atau untuk mengangkat pemimpin mereka. Masyarakat Indonesia banyak menggunakan strategi atau pendekatan politik dan budaya dalam memilih pemimpin masa depan mereka.

Budaya politik termasuk ke dalam aspek politik dari sistem nilai yang berkembang di masyarakat, dan dipengaruhi oleh suasana zaman dan tingkat pendidikan masyarakat itu sendiri. Hal ini dikarenakan budaya politik yang berkembang di negara tersebut dilatarbelakangi oleh situasi, suasana, dan pendidikan dari masyarakat itu sendiri, terutama pelaku politik yang memiliki kewenangan dan kekuasaan untuk membuat kebijakan sehingga budaya politik yang berkembang dalam masyarakat suatu negara akan mengalami perubahan dari waktu ke waktu.¹

¹ Hasmirah, *Budaya Politik Etnis Tionghoa*, (Makasar: Skripsi, 2007), 9-10

Menurut pandangan Gabriel Almond dan Sidney Verba budaya politik adalah mengacu pada orientasi politik sikap terhadap peranan kita sendiri dalam sistem tersebut. Menurut Sidney Verba ada 3 klasifikasi budaya politik yaitu (1) Budaya politik parokial, yaitu tingkat partisipasi politik sangat rendah, yang disebabkan faktor kognitif (misalnya tingkat pendidikan relatif rendah), (2) budaya politik subyek yaitu masyarakat bersangkutan sudah relatif maju tetapi masih bersifat pasif dan (3) budaya politik partisipan yaitu budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik sangat tinggi.

Pada era budaya politik yang berkembang dalam demokrasi parlementer sangat beragam, dengan tingginya partisipasi massa dalam menyalurkan tuntutan mereka sehingga menimbulkan anggapan bahwa seluruh lapisan masyarakat telah berbudaya politik partisipan. Anggapan bahwa rakyat mengenal hak-hak dan dapat melaksanakan kewajiban menyebabkan tumbuh deviasi penilaian terhadap peristiwa-peristiwa politik yang timbul.²

Politik partisipan adalah kegiatan individu atau kelompok orang yang secara khusus berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik dengan memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan tersebut antara lain memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (*contacting*) atau (*lobbying*) dengan pejabat pemerintahan atau anggota partai atau salah satu gerakan sosial yang melibatkan aksi langsung.³

²Rusadi Kantaprawira, *Sistem Politik Indonesia: Suatu Model Pengantar* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006), cet. Ke-10, h. 191

³Mariam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), h. 367

Masyarakat tidak akan pernah terlepas dengan politik, hal tersebut sudah menyatu dengan kehidupan mereka. Kehidupan politik juga sebagian dari interaksi hidup mereka, baik dengan sesama masyarakat maupun dengan pemerintahan atau lembaga non formal. Interaksi tersebut mengalami internalisasi ke dalam masyarakat yang kemudian membentuk pengetahuan tentang berbagai pandangan, sikap, dan praktik politik, dan menentukan cara perilaku masyarakat. Pemilu merupakan salah satu instrumen politik terpenting yang memungkinkan rakyat mengontrol pemerintahan. Pemilu juga merupakan bagian penting dari proses demokrasi di dunia modern. Melalui pemilu, masyarakat yang telah memenuhi syarat untuk memilih dapat mengekspresikan kepentingan mereka melalui isu-isu terkini dan memilih para pemimpinnya.⁴

UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 31 menentukan, bahwa pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota menetapkan kebijaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak dengan peraturan daerah Kabupaten/Kota. Kemudian di dalam Paal 40 PP No. 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, ditentukan bahwa pemilihan kepala desa secara serentak dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun. Dalam hal ini terjadi kekosongan jabatan kepala desa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak, Bupati menunjuk penjabat kepala desa.

Sebelum dilakukan pemilihan kepala desa, badan permusyawaratan desa memberitahukan kepada kepala desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan

⁴Imam Tholkhah, *Antomi Konflik di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 174

tertulis 6 (enam) bulan kepala desa sebelum masa jabatannya berakhir. Badan permusyawaratan membentuk panitia pemilihan kepala desa. Panitia pemilihan kepala desa terdiri atas unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat desa.

Pemilihan kepala desa yang sering disingkat dengan Pilkades mungkin bukan istilah yang asing lagi untuk saat ini. Pilkades merupakan hal yang paling ditunggu-tunggu di desa, karena merupakan ajang penentuan siapa yang akan merebut posisi juara di desa. Sebagai wadah untuk menampung aspirasi politik masyarakat sekaligus sebagai sarana untuk menggantikan atau melanjutkan pemerintahan desa, Pilkades diharapkan dapat memenuhi keinginan dan harapan masyarakat desa tersebut, dengan mengangkat calon-calon yang layak menjadi kepala desa. Dengan demikian Pilkades sendiri diwarnai dengan berbagai tindakan yang bertujuan untuk mendapatkan dukungan suara dari pihak banyak.

Pemilu harus dilakukan di dalam desa yang bersangkutan, kecuali ada alasan yang tepat untuk tidak memungkinkan pemilu di desa yang bersangkutan. Sedikitnya, $\frac{2}{3}$ dari seluruh jumlah yang berhak memilih harus hadir. Jika jumlah minimal (quorum) tersebut tidak tercapai maka pemilihan tidak dapat dilangsungkan.⁵ Untuk memenangkan Pilkades, mayoritas etnis atas suara sangat berharga. Bahkan di Indonesia, masih sering terjadi perbincangan di kalangan akademis dan pengawas apakah latar belakang etnis calon mempengaruhi pilihan seseorang. Dengan situasi seperti itu akan dilihat apakah pemilih cenderung untuk menentukan calon yang memiliki etnis atas dirinya. Ataupun calon yang kebetulan

⁵Bayu Surianingrat, *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*, (Jakarta: Aksara Baru, 1985), h. 92

berasal dari etnis mayoritas mendapatkan keberuntungan dan berusaha untuk memanfaatkan keuntungan itu dalam memikat sebanyak banyaknya pemilih. Perspektif suku kemungkinan tak melupakan perannya dalam Pilkades, sedikit banyak etnis juga mempengaruhi dalam pilihan pemilih.

Mengenai tentang aturan etnis dalam Pilkades, sebagaimana yang kita ketahui bersama, salah satu etnis terbesar di Sumatera adalah suku Jawa. Suku Jawa adalah kelompok etnis terbanyak di Indonesia, 47,7 % penduduk Indonesia adalah orang Jawa. Dalam beberapa kasus suara mayoritas etnis menjadi poin yang diperdebatkan oleh kandidat lainnya. Oleh karena itu, keberadaan orang Jawa dalam politik tidak dapat diabaikan sama sekali. Namun biarpun demikian, hal tersebut bukan jaminan yang pasti bahwa penguasaan terhadap mayoritas suku, seperti suku Jawa di Sumatera Utara, akan menjamin kemenangan dalam pemilihan kepala desa tersebut.

Peran pemuda dalam pemilihan kepala desa juga sangat penting. Pemuda merupakan salah satu pilar yang berperan besar dalam perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga maju mundur negara sedikit banyak ditentukan oleh pemikiran dan kontribusi positif pemuda di Indonesia. Demikian pula dalam kehidupan bermasyarakat, pemuda merupakan satu identitas potensial dan sumber daya manusia bagi pembangunan dalam struktur masyarakat sebagai penerus perjuangan bangsa. Karena pemuda harapan tanah air bisa diartikan bahwa mereka yang siap mendominasi kaum muda di masa depan.⁶

Pada prinsip peranan pemuda merupakan rangkaian usaha meningkatkan dan

⁶Wahyu Ishardino Satries, *Peran Serta Pemuda Dalam Pembangunan Masyarakat*, Jurnal Madani Edisi 1 Mei 2009, h. 88-89.

menetapkan kesadaran terhadap pemuda yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan mengamanatkan penyadaran terhadap pemuda dalam aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan (Pasal 22) dan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa pasal 6 mengamanatkan peningkatan kapasitas masyarakat yang termasuk didalam kelompok pemuda.⁷

Masyarakat saat ini telah disuguhkan dengan berbagai praktik politik yang dipaparkan di media sosial seperti media massa, media sosial maupun media cetak yang juga dialami oleh masyarakat Desa Aek Hitetoras Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara. Tentu saja, ini juga mempengaruhi pilihan politik mereka. Oleh karena itu, warga memiliki hak untuk menentukan dalam pemilu serta masyarakat desa Aek Hitetoras juga berpartisipasi dalam pemilihan secara adil.

Pemilihan kepala desa tidak dapat dipisahkan dari budaya yang dimiliki oleh daerah tersebut. Dimana masyarakat desa Aek Hitetoras adalah komunitas masyarakat yang sangat beragam. Hal ini dikarenakan, desa Aek Hitetoras memiliki beberapa suku, pemeluk agama, yakni Islam dan Kristen. Namun, meskipun terdapat keseragaman dalam hal agama dan etnis, dalam masalah sosial, konflik kerap kali terjadi dan sebagai contoh dalam pemilihan kepala desa secara serentak ini, terjadinya kericuhan yang mengakibatkan konflik yang serius. Konfliknya tidak heran bila dalam Pilkadaes terkadang menimbulkan sikap

⁷Lia Oktafiniyani, Peranan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor (GPA) dalam Penanaman Moral Generasi Muda di Kecamatan Purwodadi, *Skripsi*, Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2013.h.56.

primordialisme.⁸ Oleh karena itu, kita harus menyadari bahwa demokrasi bukanlah sistem yang terlepas bagian dari “SARA” (Suku, Agama, Ras, dan Adat Istiadat). Bahkan, demokrasi khususnya pada saat Pilkadaes, rumor SARA telah membuat seruan aksi bagi sebagian politikus. Beberapa faktor tersebut seringkali dipandang sebagai pertanyaan penting dari ahli politik lokal desa sebagai cara untuk menentukan suara dari kelompok tertentu.

Ikatan primordialisme keagamaan dan etnis menjadi salah satu alasan penting dari masyarakat dalam menyikapi terhadap elektabilitas (keterpilihan) pasangan calon. Jika seorang calon memiliki latar belakang ikatan primordialisme yang sama dengan ikatan primordialisme masyarakat, maka hal tersebut menjadi alternatif pilihan masyarakat. Ikatan emosional tersebut menjadi pertimbangan penting bagi masyarakat untuk memilihnya. Ikatan emosional tidak hanya didasarkan atas sitem kekerabatan semata, akan tetapi agama menjadi pengikat ikatan emosional, tempat tinggal, ras/suku, budaya, dan status sosial ekonomi, sosial budaya juga menjadi unsur penting dalam ikatan emosional komunitas masyarakat tertentu.⁹

Yang menarik dari sini adalah konflik Pilkadaes secara serentak yang dilakukan di desa tersebut. Proses pemilihan kepala desa secara serentak di desa tersebut telah selesai sejak Januari 2019 lalu. Bahkan sebagian kepala desa terpilih kini telah dilantik. Proses demokrasi yang terjadi di desa itu memiliki hiruk-pikuk dan magnet tersendiri di kalangan masyarakat desa tersebut. Pasalnya prosesnya

⁸Nazaruddin Sjamsuddin, *Profil Budaya Politik Indonesia* (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafutri 1991),h. 21

⁹Salomo Panjitan, “Primordialisme Etnis Dan Agama Dalam Pilkada Gubernur Sumatera Utara”*Jurnal Darma Agung*, XXI: 10, (Medan:Februaru, 2013), h. 3-4

ternyata hingga kini masih meninggalkan bara konflik. Banyak persoalan yang tersisa dan sekali-sekali akan meletup menjadi konflik antar masyarakat. Akibat dari konflik Pilkades itu, sampai sudah diadukan kepada pihak yang berwajib, dikarenakan dari pihak Timses sebelah telah mencopot dan menghancurkan alat peraga kampanye. Penduduk desa kaget dengan rusaknya alat peraga kampanye (APK) di salah satu calon kepala desa nomor urut 2. Bukan hanya satu, tapi APK sepanjang jalan utama desa, baik spanduk besar maupun spanduk kecil.

Berdasarkan permasalahan diatas menimbulkan tanda tanya sendiri tentang bagaimana sebenarnya etnis menjadi pengaruh terhadap pemilihan. Sehingga oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mencoba mencari tahu lebih dalam tentang bagaimana peran suku dan pemuda dalam mempengaruhi budaya politik. Selain itu peran pemuda sendiri dalam menyikapi permasalahan terhadap timses calon kandidat di dalam Pilkades Desa Aek Hitetoras. Mengingat isu penting terkait dengan tujuan hidup masyarakat luas, dimana pilihan kepala desa akan menentukan masa depan desa, maka penulis mengambil judul dengan judul **"BUDAYA POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA (STUDI KASUS PEMILIHAN KEPALA DESA AEK HITETORAS KECAMATAN MARBAU KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2019).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai bentuk pertanyaan penelitian yaitu:

1. Bagaimana peran politik etnisitas dalam pemilihan kepala desa di desa Aek Hitetoras Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara ?
2. Bagaimana peran pemuda dalam pemilihan di Desa Aek Hitetoras Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara ?

C. Tujuan Masalah

Dalam sebuah penelitian harus memiliki tujuan mengapa sebuah penelitian ini dilakukan, adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui bagaimana peran politik etnisitas suku dalam pemilihan kepala desa di Desa Aek Hitetoras Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara.
2. Mengetahui bagaimana peran pemuda dalam pemilihan di Desa Aek Hitetoras Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat, adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini antara lain adalah :

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi sebuah referensi mengenai budaya politik khususnya dalam studi budaya dan politik. Sehingga akan bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu sosial.

- b. Secara umum, penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan masyarakat luas tentang budaya politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa di Desa Aek Hitetoras Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara.

E. Penelitian Terdahulu

1. Buku Dr. Franz Magnis Suseno Sj “*Etika Politik*” Tahun 2015. Dalam buku ini penulis membicarakan tentang hal legitimasi hukum dan negara, termasuk legitimasi kekuasaan yang religius, tradisional, hubungan antara hukum dan keadilan, hak-hak manusia, wewenang negara dan batas-batasnya, demokrasi, ideologi, dan keadilan sosial. Buku ini membahas pikiran-pikiran beberapa tokoh filsafat politik seperti Platon, Aristoteles, Augustinus, Thomas Aquinas, Hobbes, Locke, Rousseau, Hegel dan Marx yang semuanya telah memberikan sumbangan hakiki terhadap paham yang menjadi pokok bahasan buku ini.
2. Buku A Haryanti “*Sistem Politik Indonesia*” Tahun 2019. Dalam buku ini membahas tentang fungsi sistem politik yang sehat dan sejahtera untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya berbagai aspek kehidupan negara, aspek dimaksud meliputi aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, hukum, hamnkam. Tumbuh dan berkembang aspek-aspek tersebut ditujukan untuk memberikan nilai tambah dan masukan bagi sistem politik dalam mengisi dan membangun infrastruktur dan suprastruktur politik yang merupakan persyaratan dan syarat terwujudnya tujuan nasional negara Indonesia.

3. Skripsi”Budaya Politik Masyarakat Desa Kedadongan Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen Pada PILKADA Langsung Tahun 2015” pada Tahun 2017. Skripsi ini membahas tentang masyarakat Desa Kedadongan secara umum termasuk ke dalam tipe budaya politik subjek partisipan sesuai dengan teori Gabriel Almond dan Sidney Verba, faktor –faktor yang mempengaruhinya yaitu pendidikan, media massa, dan imbalan. Sedangkan skripsi saya membahas tentang Bagaimana peran suku dalam pemilihan kepala desa di desa Aek Hitetoras Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Bagaimana peran pemilih pemula atau pemuda dalam pemilihan di Desa Aek Hitetoras Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara.

F. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah proses penelitian dan pemahaman berdasarkan metodologi yang mempelajari sosial. Pada penelitian ini, peneliti membuat gambaran yang kompleks, meninjau kata-kata, menulis deskripsi rinci dari sudut pandang informan, dan melakukan penelitian di lingkungan sosial.¹⁰Oleh karena itu metode dan langkah berikut akan digunakan untuk mendapat bahasa serta berita yang seksama yaitu :

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis. Studi fenomenologis adalah peneliti berusaha memahami arti dari berbagai peristiwa

¹⁰Hamid Darmadi, *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*,(Bandung: Alfabeta, 2013),h., 286.

dalam setting tertentu dengan kacamata peneliti sendiri. Penggunaan pendekatan ini dimulai dengan sikap diam, ditunjukkan untuk menelaah apa yang sedang dipelajari. Cara fenomenologis menekankan berbagai aspek subjektif dari perilaku manusia kemudian peneliti berusaha memahami bagaimana subjek memberi arti terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kehidupannya. Peneliti percaya bahwa berbagai cara manusia untuk menginterpretasikan pengalamannya lewat interaksi dengan orang lain.¹¹

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian yaitu subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. Jika kita bicara tentang subjek penelitian, maka kita berbicara tentang analisis, yaitu subjek yang sebagai tempat perhatian atau sasaran peneliti.¹² Teknik ini digunakan untuk mewawancarai :

- a. Kepala desa
- b. Masyarakat
- c. Pemuda desa

3. Informan

Informan adalah orang yang memberikan informasi. Maka informasi bisa dikatakan sama dengan responden, apabila pemberian keterangan tersebut dipancing oleh pihak peneliti¹³. Pada penelitian ini terdapat 15 informan yang memberikan informasi secara mendalam yang di perlukan peneliti.

¹¹Salim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Citapustaka 2021),h,87-88.

¹²Suharsmi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*,(Jakarta: Rineka Cipta,2006),h,145.

¹³*Ibid*,h.146

4. Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini lokasi peneliti yang akan dijadikan sebagai sumber penelitian yaitu di Desa Aek Hitetoras Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara.

5. Sumber Data

Data adalah fakta empiris yang dikumpulkan selama penelitian untuk memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian. Data penelitian dapat berasal dari berbagai sumber, dikumpulkan dengan cara yang berbeda selama kegiatan penelitian.¹⁴

Data penelitian ini dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu data secara Primer dan Sekunder.

a. Data primer

Data primer berupa informasi dalam bentuk lisan yang langsung diperoleh penulis dari sumber aslinya. Data tersebut di peroleh berdasarkan observasi secara langsung yang di dukung berdasarkan keterangan informan di lapangan yang diambil secara tepat oleh peneliti. Pencatatan sumber data dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya yang kemudian akan didokumentasikan dalam bentuk merekam selama wawancara berlangsung untuk mendapat informasi secara utuh yang dilakukan secara sadar dan terarah sehingga menghasilkan informasi yang lengkap sesuai dengan apa yang dibutuhkan.¹⁵

¹⁴Salim dkk, *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, dan Jenis* (Jakarta: Kencana,2019),h. 103

¹⁵Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: CV ALFABETA, 2006), h. 194

b. Data Sekunder

Data yang yang digunakan berupa data tertulis yang diperoleh dari berbagai sumber yang berkaitan dengan tujuan penelitian.

6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan penting dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi, dan sebaliknya. Oleh karena itu, tahaap ini tidak boleh salah dan harus dilakukan dengan cermat sesuai prosedur dan ciri-ciri penelitian kualitatif.

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak observasi berperan serta (participant observation), wawancara mendalam (in depth interview) dan dokumentasi.¹⁶

a. Observasi

Observasi yang di maksud teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung pada objek kajian penelitian di lapangan.¹⁷ Dalam penelitian ini, observasi yang digunakan adalah observasi non partisipan. Observasi Non Partisipan adalah observasi yang dilakukan dimana peneliti tidak ikut di dalam kehidupan orang yang diobservasi , dan secara terpisah berkedudukan sebagai pengamat.¹⁸

¹⁶*Ibid*,h, 297.

¹⁷Iqbal Hassab M, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*.(Bogor: Ghalia Indonesia, 2002),h. 110

¹⁸Hasyim, Hasnah. *Teknik-teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial)*. Jurnal at-Taquaddum,8(1), 2016 , h. 35

b. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang atau lebih dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada informan, dan jawaban-jawaban informan dicatat atau direkam. Wawancara dalam penelitian ini menggunakan jenis wawancara mendalam (in depth interview). Wawancara mendalam merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Teknik ini digunakan untuk mewawancarai :

- a. Kepala Desa
- b. Masyarakat
- c. Pemuda desa
- c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah rekaman peristiwa masa lalu dalam bentuk catatan, foto, peristiwa, atau mobil yang monumental. Dokumen ini digunakan untuk memperoleh data tertulis di kantor kepala Desa Aek Hitetoras Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara.

7. Teknis Analisi Data

Analisis data kualitatif dalam hal ini adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan lainnya, sehingga mudah untuk dipahami dan diinformasikan kepada orang lain. Data yang sudah dikumpulkan kemudian dapat dianalisis, agar mencapai proses yang

diinginkan oleh peneliti dan berjalan sesuai proses penelitian dan dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai hal dari penelitian berupa fenomena atau kejadian yang tersusun dengan sistematis.

G. Sistematika Pembahasan

BAB I: berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Masalah, Manfaat Penelitian, Kajian Terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika pembahasan.

Bab II: berisi sejarah, gambaran umum lokasi penelitian, bab ini menjelaskan tentang gambaran keseluruhan wilayah desa Aek Hitetoras.

Bab III: berisi teori budaya politik, partisipasi politik serta teori pemilihan kepala desa.

Bab IV: berisi Peran suku dan peran pemuda dalam memilih kepala desa di Desa Aek Hitetoras Kabupaten Labuhanbatu Utara. Bab ini akan menguraikan hasil penelitian bagaimana peran suku dan pemuda dalam pemilihan kepala desa dalam mempengaruhi budaya politik.

Bab V berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran-saran dari penulis, juga pada akhir pembahasan ini, penulis mencantumkan daftar pustaka sebagai dasar literatur dalam pembahasan skripsi ini